

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan dalam pembangunan nasional yaitu menjadikan masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual. Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menciptakan landasan yang kuat bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang berkelanjutan supaya output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sehingga pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dilihat sebagai perubahan yang terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja (Todaro, 2014).

Pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara tidak terlepas dari faktor – faktor yang saling terkait seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran individu sebagai pengelola. Manusia didefinisikan sebagai

konsumen hasil pembangunan, input pembangunan, dan tenaga kerja (Pangastuti, 2015).

Permasalahan terbesar pembangunan daerah adalah menekankan kebijakan pembangunan itu sendiri berdasarkan karakteristik daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal (Arsyad, 2009). Kegiatan ekonomi meningkat dengan menciptakan lapangan kerja baru dalam proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk harus mengikuti pertumbuhan kesempatan kerja agar tidak mempengaruhi proses pembangunan ekonomi daerah.

Dengan meratanya pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak dapat terjamin kesejahteraan penduduknya hanya karena Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Namun, permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran masih tergolong banyak. Hal tersebut diakibatkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah Indonesia.

Permasalahan utama di sektor ketenagakerjaan yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang lambat dengan disertai penurunan tingkat penduduk yang bekerja. Pertumbuhan penduduk dan penyerapan tenaga kerja harus seimbang agar tidak terjadi penambahan pengangguran. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi dengan dilihat dari banyaknya pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan tenaga kerja di berbagai industri dan bidang usaha didorong oleh

permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja biasa dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (H. Kuncoro, 2012).

Dalam islam mengajarkan untuk tidak melakukan kegiatan memintaminta dalam mencari nafkah tetapi islam mengajarkan manusia untuk bekerja keras atau berdagang untuk mencari harta kekayaan. Harta merupakan alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan untuk memenuhi beberapa perintah Allah SWT seperti infak, zakat, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya (Nuhayati & Wasilah, 2015). Hal tersebut telah tercantum dalam Q.S At-Taubah (9) Ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang mukmin yang akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja karena dengan bekerja kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan setiap pekerjaan atau perilaku akan membawa amal ataupun dosa, baik besar maupun kecil, hal ini pasti akan terlihat jelas kelak di hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bekerja dalam pandangan islam adalah kewajiban setiap umat untuk mencapai kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri seperti yang tertulis didalam Al-Qur’an firman Allah surah An-Najm ayat 39 tertulis:

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ

Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada jalan yang mudah dalam mencapai kesuksesan karena dibutuhkan perjuangan dan usaha untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Kerja keras disini diartikan sebagai bentuk usaha sehingga semakin besar usaha seseorang untuk mencapai kesuksesan, maka semakin tinggi pula imbalan yang akan diterima. Oleh sebab itu, Islam mendorong umat untuk menjadi pekerja dengan meningkatkan kualitasnya baik melalui pendidikan, pelatihan maupun keterampilan (Hijriah & Adiba, 2019).

TABEL 1.1
Jumlah Penduduk di Eks Karesidenan Banyumas
Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Eks Karesidenan Banyumas (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (persen)
2010	4.914.499	-
2011	4.967.600	1,08
2012	5.010.144	0,86
2013	5.051.469	0,82
2014	5.091.691	0,80
2015	5.130.837	0,77
2016	5.168.932	0,74
2017	5.205.996	0,72
2018	5.429.385	4,29
2019	5.268.467	-2,96
2020	5.738.103	8,91

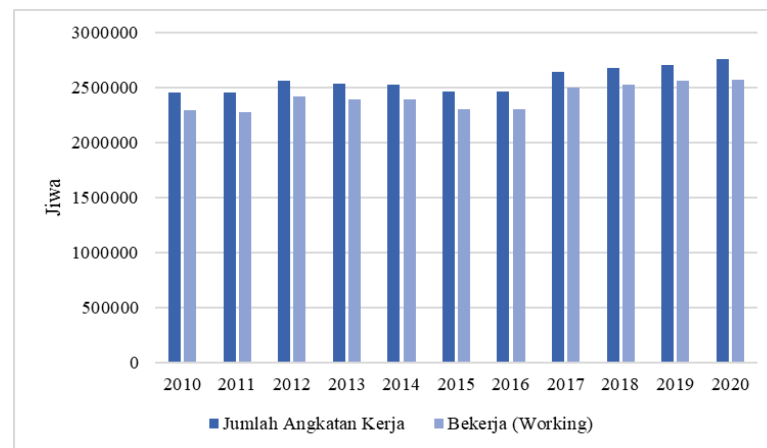
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan kondisi jumlah penduduk kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 sampai dengan 2020. Dapat dilihat pertumbuhan penduduk di Eks Karesidenan Banyumas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2020 jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5.738.103 jiwa dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,91. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas penduduk untuk meningkatkan produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Banyumas.

Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu maupun sementara sedang tidak bekerja dikarenakan alasan tertentu. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah minimal 15 tahun. Oleh karena itu, setiap orang atau penduduk yang berusia di atas 15 tahun sudah termasuk golongan tenaga kerja.

Kondisi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 1.1. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini diketahui bahwa selama satu dekade terakhir, kondisi penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas berfluktuasi. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penyerapan tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja yang bekerja (*working*) tertinggi terjadi pada tahun 2020. Dilihat dari hal tersebut dikatakan penyerapan tenaga kerja belum optimal karena masih terjadi penurunan. Oleh

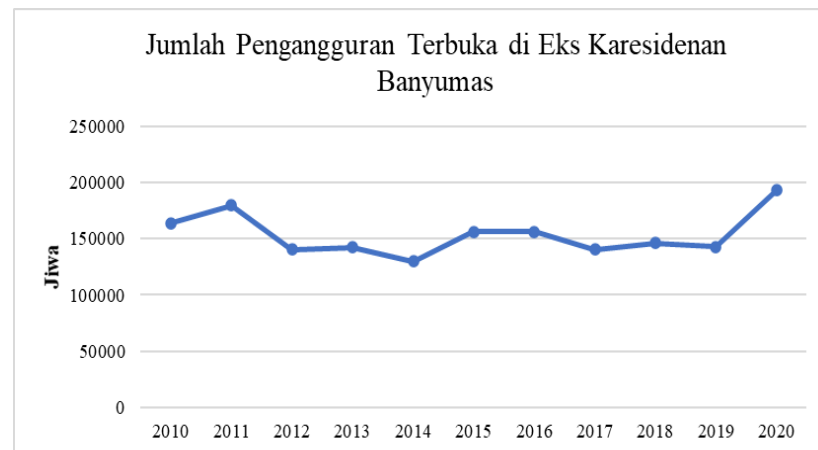
karena itu, pemerintah harus menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tingginya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang memadai akan mengakibatkan terjadinya pengangguran.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021

GAMBAR 1.1
Jumlah Angkatan Kerja di Eks Karesidenan Banyumas
Tahun 2010 -2020

Pengangguran merupakan masalah yang disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang tidak dapat memenuhi tingginya permintaan tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti memburuknya neraca pembayaran, peningkatan utang luar negeri, dan kebijakan lainnya (Todaro, 2006). Menurut Gambar 1.2 berikut ini diketahui jumlah pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Banyumas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 193.007 jiwa dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 130.051 jiwa.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021

GAMBAR 1.2
Tingkat Pengangguran di Eks Karesidenan Banyumas
Tahun 2010-2020

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Ketika PDRB daerah meningkat, maka semua kegiatan ekonomi di daerah juga meningkat dan membaik. Seiring dengan meningkatnya *output* atau penjualan perusahaan, maka perusahaan juga akan menambah permintaan tenaga kerja untuk meningkatkan *output* guna mengejar peningkatan penjualan (Feriyanto, 2014).

Laju pertumbuhan PDRB di empat kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas mengalami minus disebabkan adanya permasalahan global yaitu pandemic covid-19. Berikut tabel laju pertumbuhan PDRB Atas

Dasar Harga Konstan kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

TABEL 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Eks
Karesidenan Banyumas Tahun 2010 – 2020 (persen)

Tahun	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara
2010	6,97	6,61	6,63	5,51
2011	5,94	6,61	5,67	5,44
2012	4,95	5,88	5,79	5,23
2013	5,25	6,97	5,27	5,44
2014	5,34	5,67	4,85	5,31
2015	5,55	6,12	5,47	5,47
2016	5,09	6,05	4,85	5,44
2017	5,33	6,34	5,37	5,65
2018	5,14	6,45	5,42	5,67
2019	5,23	6,32	5,65	5,60
2020	-1,35	-1,65	-1,23	-1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2021

Dalam bidang ketenagakerjaan, Upah minimum juga menjadi pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Upah minimum berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan, kondisi perekonomian, dan performa kerja. Tingkat upah yang semakin meningkat maka akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, sehingga untuk melakukan efisiensi perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Adanya pengurangan tenaga kerja tersebut maka berakibat rendahnya tingkat kesempatan kerja (Ishak, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur suatu

pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Menurut (Anggraini, 2018), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komparatif dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. Jika setiap masyarakat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hal tersebut dapat diwujudkan dari investasi kesehatan dan pendidikan melalui ilmu dan keterampilan.

Inflasi juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut (Aji & Mukri, 2020), Inflasi merupakan keadaan dimana harga naik secara terus menerus selama jangka waktu yang sangat lama dengan diiringi oleh nilai uang yang turun sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Dengan kata lain inflasi merupakan kenaikan harga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Inflasi yang tidak stabil maka masyarakat sulit untuk mengambil keputusan dalam berkonsumsi. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain inflasi, jumlah industri erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri sendiri merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian karena dapat memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar dan berperan strategis dalam menggerakkan usaha dan lapangan kerja. Dengan bertambahnya jumlah industri, penyerapan tenaga kerja meningkat. Jadi, ketika industri baru dibangun pasti tenaga kerja akan dibutuhkan (Asmara, 2018).

Dalam kondisi diatas, wilayah Eks Karesidenan Banyumas mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin besar dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk diandalkan, namun disisi lain juga akan menimbulkan permasalahan yang akan berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Jika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan peningkatan pengangguran yang relatif tinggi.

Kelima variabel di atas telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti halnya yang diteliti oleh (Destiana & Prawoto, 2018) dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan positif pada variabel PDRB dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan di Jawa Timur. Begitu juga sebaliknya pada variabel IPM dan UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan di Jawa Timur.

Variabel UMK yang dilakukan oleh (Lube et al., 2021) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung yang artinya jika UMK mengalami kenaikan maka penyerapan tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan, variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. Namun, secara simultan variabel UMK dan PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung.

Variabel IPM yang dilakukan oleh (Hafiz & Haryatiningsih, 2021) secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat, variabel PDRB dan UMK juga secara parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Namun, secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Variabel Inflasi yang dilakukan oleh (Patriansyah, 2018) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel Upah Minimum dan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Variabel jumlah industri besar dan sedang yang dilakukan oleh (Ardiansyah, 2018) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Sedangkan Upah Minimum tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang di Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari dan mengembangkan faktor-faktor yang diduga menurut penelitian terdahulu

dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang meliputi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, dan Jumlah Industri. Oleh karena itu, judul penelitian yang peneliti gunakan adalah **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA EKS-KARESIDENAN BANYUMAS PERIODE 2010 – 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2010 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2010 – 2020?
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2010 – 2020?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas periode tahun 2010 – 2020?

5. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri Besar dan Sedang terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas periode 2010 – 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan atas rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 – 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 – 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 – 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 – 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri besar dan sedang terhadap penyerapan tenaga kerja di Eks Karesidenan Banyumas tahun 2010 – 2020.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktik maupun teoritis. Berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Untuk Pemerintah Daerah di Eks Karesidenan Banyumas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi serta masukan bagi lembaga yang bersangkutan dalam pembuatan kebijakan yang memiliki hubungan dengan perkembangan pembangunan sektor industri.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan di Eks Karesidenan Banyumas, dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penulisan penelitian yang akan datang.